

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi disuatu daerah dapat mengindikasikan bagaimana prestasi dan perkembangan ekonomi di daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah itu dapat bernilai positif dan dapat pula negatif. Jika pada periode perekonomian mengalami pertumbuhan yang positif, menandakan kegiatan ekonomi di daerah tersebut mengalami peningkatan. Sedangkan jika pada suatu periode perekonomian mengalami pertumbuhan yang negatif, menandakan kegiatan ekonomi di daerah tersebut mengalami penurunan (Sukirno, 2004). Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu hasil nyata yang berasal dari suatu pembangunan oleh suatu daerah.

Kebijakan pemerintah daerah saat ini mampu memberikan suatu kontribusi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga menjadi bukti bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam menjalankan roda pendorong pertumbuhan ekonomi nasional memberikan dampak yang positif khususnya di Pulau Jawa. Ekonomi Indonesia secara spasial masih di dominasi oleh Pulau Jawa dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2015 menyumbang angka pertumbuhan sebesar 58,4 persen dengan pertumbuhan sebesar 5,41 persen dari tahun sebelumnya.

Pada enam tahun terakhir ekonomi nasional terjadi perlambatan ekonomi yang signifikan. Lesunya perekonomian global pada beberapa tahun terakhir membuat perekonomian ekonomi di banyak negara ikut melambat. Pada perekonomian nasional tahun 2010 sampai dengan 2015 Pulau Jawa selalu memberi kontribusi sebagai penyumbang angka pertumbuhan tertinggi di Indonesia dengan angka rata-rata sebesar 57,85 persen dan di susul dengan Pulau Sumatera sebagai penyumbang pertumbuhan ekonomi kedua dengan angka rata-rata sebesar 23,3 persen. Sementara kontribusi Kalimantan tercatat rata-rata pertumbuhan sebesar 8,8 persen, Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,5 persen, Sulawesi 4,9 persen dan Maluku Papua sebesar 2,3 persen. Pada tabel di bawah menunjukkan angka pertumbuhan ekonomi menurut kepulauan di Indonesia pada tahun 2010 sampai dengan 2015.

Pada enam tahun terakhir pada ekonomi nasional terjadi perlambatan laju pertumbuhan ekonomi secara signifikan hingga tahun 2015 merupakan angka terendah yakni sebesar 4,88 persen. Akan tetapi, pulau Jawa sebagai kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan sebesar 58,4 yang sebelumnya hanya sebesar 57,7 persen.

Tabel 1.1
 Pertumbuhan Ekonomi menurut Kepulauan di Indonesia
 Tahun 2010-2015 (persen)

Wilayah	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata
Sumatera	23,2	23,5	23,7	23,9	23,8	22,1	23,3
Jawa	57,8	57,6	57,5	58,1	57,7	58,4	57,85
Bali dan Nusa Tenggara	2,7	2,4	2,3	2,2	2,5	3,1	2,5
Kalimantan	9,1	9,6	9,1	8,7	8,5	7,85	8,8
Sulawesi	4,7	4,6	4,5	4,8	4,9	6,1	4,9
Maluku dan Papua	2,5	2,3	2,5	2,2	2,4	2,4	2,3
Nasional	6,22	6,17	6,03	5,56	5,01	4,88	5,64

Sumber: Badan Pusat Statistik 2010-2015 (diolah)

Pembangunan di provinsi-provinsi di Pulau Jawa yang berlangsung secara menyeluruh dan berkesinambungan telah meningkatkan perekonomian masyarakat. Pencapaian hasil-hasil pembangunan yang sangat dirasakan masyarakat merupakan agregat pembangunan dari enam provinsi di Pulau Jawa yang tidak terlepas dari usaha keras bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat. Namun di sisi lain berbagai kendala dalam memaksimalkan potensi sumber daya manusia dan sumber modal masih dihadapi oleh penentu kebijakan di tingkat provinsi.

Seperti yang terdapat pada Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi selama kurun waktu 2010-2015 dari enam provinsi yang ada di Pulau Jawa berfluktuasi, namun terdapat masalah pada Provinsi DI Yogyakarta dimana rata-rata pertumbuhan ekonomi masih di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar, 5,56 persen.

Tabel 1. 2

Pertumbuhan Ekonomi Enam Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2010-2015 (persen)

Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata
DKI Jakarta	6,51	6,74	6,19	6,11	5,99	5,88	6,23
Jawa Barat	6,09	6,50	6,50	6,33	5,09	5,04	5,92
Jawa Tengah	6,44	6,09	5,65	5,11	5,27	5,47	5,67
DI Yogyakarta	4,88	5,13	4,76	6,47	5,16	4,90	5,21
Jawa Timur	7,06	6,40	6,60	6,10	5,90	5,40	6,24
Banten	6,08	6,44	5,81	6,67	5,51	5,40	5,98
Nasional	6,38	6,17	6,03	5,46	5,01	4,88	5,56

Sumber : Badan Pusat Statistik 2010-2015 (diolah)

Pada Tabel 1.1 dijelaskan bahwa setiap tahunnya terjadi fluktuasi pertumbuhan ekonomi di masing-masing provinsi, akan tetapi cenderung mengalami peningkatan kecil di beberapa provinsi. Berbeda dengan Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2012-2015 mengalami penurunan. Penurunan tersebut dikarenakan pelemahan konsumsi pemerintah dan rumah tangga. Besarnya peran belanja pemerintah Kementrian/Lembaga dalam komponen pengeluaran pemerintah di DKI Jakarta berdampak pada lebih rendahnya pertumbuhan konsumsi pemerintah di DKI Jakarta. Secara keseluruhan, perlambatan pertumbuhan ekonomi di enam provinsi tersebut pada tabel 1.1 hanya berkisar antara 0 sampai 1, hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di enam provinsi tersebut masih dalam kondisi yang relatif tinggi dan stabil.

Berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi masalah perekonomian, terkait hal utama yakni sektor-sektor utama yang berkontribusi besar terhadap output nasional maka hal itu perlu di kembangkan agar dapat memperbaiki laju pertumbuhan ekonomi nasional. Pengelolaan sumberdaya di provinsi agar lebih efektif dan efisien menjadi tantangan yang harus di kerjakan oleh setiap pemerintah daerah. Pemerintah pusat memberikan bantuan untuk mengembangkan sektor-sektor yang berpotensi di wilayah daerah dengan melalui dana alokasi, untuk selebihnya maka hal itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Menurut Samuelson dan Nordhous (1996) bahwa perekonomian yang ideal adalah perekonomian yang menerapkan mekanisme pasar, artinya bahwa jalannya perekonomian sepenuhnya menjadi wewenang pasar karena hanya mekanisme pasar yang mampu mengalokasikan sumber daya secara efisien. Namun dalam hal-hal tertentu menunjukkan bahwa mekanisme pasar memiliki kelemahan yaitu gagal mencapai alokasi yang efisien disebabkan oleh adanya *common goods*, unsur ketidaksempurnaan pasar, barang publik, eksternalitas, *incomplete market*, kegagalan informasi, *unemployment* dan *uncertainty*. Untuk menghindari hal tersebut maka diperlukan campur tangan pemerintah dalam perekonomian agar alokasi sumber ekonomi dapat tercapai secara efisien. Berikut peranan pemerintah yang harus dijalankan menurut Mangkoesoebroto (1998), adalah :

1. Peranan alokasi yaitu pemerintah mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara efisien terutama dalam menyediakan barang dan jasa yang pihak swasta tidak dapat memproduksinya.

2. Peranan distribusinya yaitu pemerintah melalui kebijaksanaan fiskal merubah keadaan masyarakat sehingga sesuai dengan distribusi pendapatan yang diharapkan melalui pengenaan pajak progresif yaitu relative beban pajak yang lebih besar yang mampu dan mendistribusikan bagi yang kurang mampu.
3. Peranan stabilisasi yaitu pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mengendalikan goncangan ekonomi yang berlebihan.

Menurut Saragih (2003) dalam Barimbing dan Karmini (2015) untuk membiayai pembangunan daerah, salah satu modal yang digunakan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD yang merupakan salah satu sumber penerimaan daerah memiliki keterkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi positif memiliki kemungkinan kenaikan PAD yang merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi dan diantara pertumbuhan ekonomi dan PAD diyakini terdapat adanya korelasi.

Selain PAD, tenaga kerja juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa. Menurut Todaro (2006) dalam Priambodo (2014), pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja (yang terjadi setelah pertumbuhan penduduk) secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga kerja yang produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar.

Pada penelitian Priambodo (2014) PAD merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi kelangsungan pelaksanaan pembangunan yang dijalankan. Pembiayaan belanja modal akan berdampak pada infrastruktur guna meningkatkan

kegiatan ekonomi masyarakat penggalian pendapatan daerah, pengalokasian belanja modal dan peningkatan partisipasi tenaga kerja lokal sebagai modal pembangunan daerah.

Faktor lain yang memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Pulau Jawa antara lain adalah investasi yang merupakan indikator penting dalam menciptakan pembangunan perekonomian daerah. Hal yang penting pada investasi di suatu daerah adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih tinggi sehingga mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Menurut Pardede dan Sukmawati (2015) untuk mendukung upaya pembangunan ekonomi daerah perlu membuat kebijakan yang mendukung penanaman modal yang saling menguntungkan baik dari pemerintah daerah, pihak swasta maupun dari pihak masyarakat.

Dalam teori Harrod-Domar dijelaskan bahwa, tingkat pertumbuhan ekonomi dan investasi memiliki hubungan timbal balik yang positif dimana peningkatan investasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan begitu pula sebaliknya. Pada dasarnya pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan meningkatkan produktifitas perkapita, investasi sumberdaya manusia, investasi fisik, dan kesempatan kerja (Mishkin, 2012).

Pembangunan daerah yang berkelanjutan memiliki berbagai macam aspek yang dapat mempengaruhi. Pembangunan ekonomi memiliki sifat multidimensional yaitu pertumbuhan ekonomi tidak hanya mencakup kegiatan perekonomian, tetapi mencakup kegiatan lain yang dapat meningkatkan taraf hidup

kesejahteraan masyarakat seperti peningkatan pendidikan dan pemerataan pendapatan yang merupakan bagian dari pembentuk pertumbuhan ekonomi. Menurut Todaro dan Smith (2004) bahwa pembangunan ekonomi merupakan proses multidimensional yang mencakup perubahan struktural, sikap hidup, kelembagaan, peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan distribusi pendapatan dan pemberantasan kemiskinan.

Faktor lain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah bukan hanya mengandalkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia saja, akan tetapi pertumbuhan ekonomi juga harus di dorong dengan sumber daya manusia yang produktif dengan melalui perbaikan tingkat pendidikan yang efektif. Apabila tingkat pendidikan sumber daya manusianya yang tinggi maka hal itu menunjukkan sumber daya manusia di daerah tersebut semakin produktif. Dengan begitu akan meningkatkan output masing-masing daerah. Indikator pendidikan dapat dilihat melalui tingkat seberapa lama menempuh pendidikan dan angka melek huruf, dimana kedua merupakan komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan paparan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PAD, investasi, tenaga kerja dan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa. Oleh karena itu penelitian ini berjudul ***“Determinan Pertumbuhan Ekonomi Pulau Jawa Tahun 2010-2015”***.

B. Batasan Masalah

Pada penelitian ini akan membahas bagaimana pengaruh antara pertumbuhan ekonomi dengan PAD, investasi, tenaga kerja, dan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi enam provinsi di Pulau Jawa yakni Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Banten. Pulau Jawa sebagai penyumbang kontribusi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan adanya perlambatan ekonomi pada tahun 2010 sampai dengan 2015.

Dalam studi ini, terdapat beberapa hal yang melatar belakangi peneliti untuk mencari tahu lebih mendalam mengenai determinan penggalan PAD, peningkatan partisipasi tenaga kerja sebagai modal pembangunan daerah diharapkan menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Tingkat investasi baik PMDN dan PMA di harapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendidikan juga salah satu faktor pertumbuhan ekonomi. Apabila nilai dari masing-masing variabel meningkat maka peningkatan terjadi pada pertumbuhan ekonomi dalam hal ini adalah PDRB. Apabila nilai dari masing-masing variabel menurun maka hal itu juga terjadi terhadap PDRB. Berdasarkan fenomena tersebut maka perlu adanya suatu penelitian yang di harapkan mampu memberikan solusi demi kelangsungan pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh PAD terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Pulau Jawa tahun 2010-2015 ?
2. Bagaimana pengaruh investasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Pulau Jawa tahun 2010-2015 ?
3. Bagaimana pengaruh tenaga kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Pulau Jawa tahun 2010-2015 ?
4. Bagaimana pengaruh pendidikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Pulau Jawa tahun 2010-2015 ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini menurut permasalahan yang ada, adalah :

1. Untuk memahami dan menganalisis pengaruh PAD terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Pulau Jawa tahun 2010-2015.
2. Untuk memahami dan menganalisis pengaruh investasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Pulau Jawa tahun 2010-2015.
3. Untuk memahami dan menganalisis pengaruh tenaga kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Pulau Jawa tahun 2010-2015.

4. Untuk memahami dan menganalisis pengaruh pendidikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Pulau Jawa tahun 2010-2015.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan menjadikan penulisan ini sebagai acuan/rujukan dalam membuat karya ilmiah maupun penelitian selanjutnya bagi dunia pendidikan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang hal yang telah diteliti dan mampu membandingkan teori yang diterima di lapangan maupun di bangku perkuliahan mengasah daya analisis peneliti untuk memecahkan permasalahan ekonomi.

b. Bagi Pemerintah

Pemerintah dapat menggunakan penelitian ini untuk mengambil kebijakan apa yang harus diterapkan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat memahami lebih jauh untuk pengambilan kebijakan selanjutnya guna menyelesaikan permasalahan ini.